



UMP DIY Siap Ditetapkan

■ UMK Kulon Progo Diusulkan Naik 5,5 Persen

Ya itu kan simulasinya. Kita lihat saja nanti penetapannya. Tetap mengacu Cipta Kerja PP 36.

YOGYA, TRIBUN - Teka-teki kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 di DIY akan terjawab hari ini, Kamis (17/11). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Arya Nugraha menjelaskan, jika mengacu peraturan perundang-undangan, penetapan UMP menunggu Keputusan Gubernur DIY. Sri Sultan Hamengku Buwono X paling lambat 21 November 2021. Sementara untuk UMK ditetapkan paling lambat 30 November 2021. "Karena tanggal 21 hari Minggu maka (penetapan) dilakukan pekan ini. Kalau Dewan Pengupahan tidak punya kewenangan untuk mengumumkan," ungkap Arya, Rabu (17/11). Dia melanjutkan, formulasi penentuan

UMP sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan peraturan turunan dalam UU Cipta Kerja. Setelah Kementerian Ketenagakerjaan menggelar simulasi penghitungan UMP, terungkap bahwa kenaikan UMP 2022 rata-rata adalah sebesar 1,09 persen. Untuk DIY kenaikannya berkisar 4 persen. Menanggapi hasil tersebut, Arya enggan berkomentar banyak. "Ya itu kan simulasi. Kita lihat saja nanti penetapannya. Tetap mengacu Cipta Kerja PP 36. Kalau angka nya ngikut keputusan (Gubernur DIY) saja," jelasnya. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trans-

● ke halaman 11

UMP DIY

● Sambungan Hal 1

migrasi Bantul Istirul Widhiastuti memastikan bahwa penetapan UMP akan dilaksanakan Kamis ini. "Besok (hari ini) rencana ditetapkan oleh Gubernur jam 10 di Kepatihan," terangnya.

Penetapan UMK

Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan bakal ada kenaikan UMK pada 2022. Saat ini, eksekutif sudah mengantongi rekomendasi, yang bakal diserahkan kepada Gubernur DIY untuk disahkan.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan antara serikat pekerja, dengan asosiasi pengusaha, yang difasilitasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Tetapi, dirinya menegaskan, keputusan di tangan provinsi.

"Sudah ada kesepakatan, tapi yang disepakati itu berupa rekomendasi, bukan keputusan, karena yang memutuskan Gubernur. Setelah dari sana, baru kita dapat menyampaikan bera-

pa UMK-nya itu," cetusnya, Rabu (17/11).

Walaupun belum bersedia menaparkan angka, Haryadi bisa memastikan, UMK 2022 mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Katanya, hal tersebut sesuai dengan hasil simulasi Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah mengumumkan peningkatan sebesar 1,09 persen.

"Ya dong, ada kenaikan pasti. Saya nggak mau mendahului Gubernur, karena masih dibahas. Yang jelas, ada kenaikan dari yang lalu, kan sudah ada acuannya," ujarnya.

Wali Kota menjelaskan, pembahasan UMK 2022 bersama asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja, berjalan lancar, ia menilai, kedua belah pihak dapat memahami bahwa UMK yang akan ditetapkan harus mengakomodir kondisi iklim investasi DIY, khususnya di Kota Yogyakarta.

"Ya, kalau terlampau tinggi nanti investor nggak ada yang masuk. Tapi, kalau terlalu rendah, ya, bahaya juga, siapa yang mau kerja di sini nanti. Tidak ada tenaga kerja yang

mau itu, kalau upah minimumnya rendah," ucap Haryadi.

"Karena pendekatan kita, antara pengusaha, serta pekerja, jadi ada harmonisasi, dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, dan juga perkembangan, maupun pembangunan kota ke depan," tambahnya.

Di Kulon Progo, Disnakertrans menyampaikan UMK 2022 di wilayahnya diusulkan naik 5,5 persen. Dengan demikian, besaran UMK Kulon Progo di tahun depan mencapai Rp 1.904.275.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, Nur Wahyudi mengatakan kenaikan UMK itu merupakan hasil kesepakatan antara pekerja, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aptindo).

"Sehingga disepakati UMK Kulon Progo sebesar Rp 1.904.275. Besaran upah itu meningkat 5,5 persen dari tahun ini Rp 1.805.000," ungkapnya.

Usulan UMK itu sudah disampaikan ke Bupati Kulon Progo, Sutedjo. Kemudian bupati akan meneruskan

ke Gubernur DIY. Sehingga untuk keputusan terkait UMK dan UMP akan ditetapkan gubernur.

Ia menyebut, keberadaan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Temon ke depannya juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo. Meski kondisi bandara saat ini masih belum normal.

"Nantinya kalau kondisi normal dan pandemi Covid-19 mereda diharapkan penerbangan di YIA lebih banyak. Sehingga banyak orang berdatangan ke Kulon Progo melalui YIA. Kemudian berdampak pada perekonomian termasuk pariwisata," kata Nur.

Sementara itu, Ketua DPC Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kulon Progo, Taufik Rico Khairul Azhar mengatakan awalnya dari KSPSI optimis mengusulkan UMK di angka 5,7 persen. Namun dari Apindo mengusulkan di angka 5,4 persen. Sehingga saat sedang dengan Dewan Pengupahan terjadi musyawarah yang kemudian disepakati di angka 5,5 persen. (tro/aka/scp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005